

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA

Nurul Aulia^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the extent of development progress in Biringala Village through the implementation of the IDM Policy. The research method used qualitative to understand the abilities that were capable of being carried out by the research subjects, while the data collection techniques used the methods of observation, interviews, and document studies with a total of 8 informants. The results showed that the Policy Implementation of the Developing Village Index (IDM) in Biringala Village was appropriate and in accordance with the policy implementation method proposed by Van Meter and Van Horn, namely, Standards and policy targets/measures and policy objectives that had been understood and implemented, Resources which consisted of ADD, DD, and PAD, Characteristics of implementing organizations that were tailored to the needs of the economic, environmental and social resilience index, Attitudes of implementers who supported and implemented IDM, Communication between related organizations and implementation activities where each activity and decision were communicated with both by policy implementers to related organizations and finally the social, economic and political environment that supports the implementation of IDM policies in Biringala Village.

Keywords: *developing village index, implementation, policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan di Desa Biringala melalui implementasi kebijakan IDM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami kemampuan yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Biringala sudah tepat dan sesuai metode implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu, Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah dipahami dan dijalankan, Sumber daya yang terdiri dari ADD, DD, dan PAD, Karakteristik organisasi pelaksana yang disesuaikan kebutuhan dari indeks ketahanan ekonomi, lingkungan dan sosial, Sikap para pelaksana yang mendukung dan menjalankan IDM, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dimana setiap kegiatan dan keputusan dikomunikasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan kepada organisasi-organisasi terkait kemudian terakhir Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mendukung pelaksanaan kebijakan IDM di Desa Biringala.

Kata kunci: kebijakan, implementasi, indeks desa membangun

* nurulaulia@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi menjadi lokal dan wilayah. Setiap distrik akan diwakili oleh strategi yang mengacu pada administrasi manajerial dan kemajuan yang memiliki wilayah lebih sederhana daripada negara. Setiap pemerintahan teritorial dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara adil yang bertanggung jawab untuk menangani daerah dari tingkat umum, wilayah dan kota.

Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, untuk mendukung pembangunan di Desa Peraturan Bupati Gowa Nomor 7 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Dimasukkan untuk memberikan data arah ke kota, negara teritorial dan fokus. dalam menggunakan informasi dan data

Indeks Pembangunan Daerah sebagai salah satu dasar selama menyusun, melaksanakan, dan mengamati penilaian kemajuan Daerah.

Terkait Pelaksanaan IDM di Daerah Biringala Hal ini juga dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk rekonsiliasi dan peningkatan energi koperasi. Harapannya dapat diketahui bahwa terwujudnya kawasan lokal daerah yang sejahtera, adil dan otonom di Daerah Biringala. Desa Biringala menjadi Lokus penelitian ini karena peneliti beranggapan bahwa perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait Implementasi kebijakan IDM Di Desa tersebut yang mengalami kendala-kendala dalam pembangunan untuk keluar menjadi desa mandiri seperti yang dipaparkan oleh pemerintah desa dibawah ini.

Konsekuensi dari persepsi yang mendasari analisis pada (Rabu 17-02-2022). Desa Biringala belum memiliki pilihan untuk menangani isu-isu yang dialami dan belum memiliki pilihan untuk menyelidiki potensinya sehingga pengakuan terhadap eksekusi strategi benar-benar terbentuk di otoritas publik. Jika dilihat dari masalah pembangunan di Desa Biringala ini yaitu yang pertama dari dimensi sosial untuk fasilitas kesehatan tidak menunjang karena tidak terdapat puskesmas yang menjadi

fasilitas untuk kegiatan sosial kesehatan masyarakat desa, yang kedua yaitu dimensi ekonomi di Desa Biringala sangat diperlukan pasar tradisional desa untuk menunjang ketahanan ekonomi dimana akan tercipta kegiatan jual beli dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Biringala yang sebenarnya memiliki potensi dibidang ekonomi karena mayoritas dari penduduknya adalah pedagang, kemudian yang ketiga dari dimensi ekologi/lingkungan masih berpotensi terjadi bencana banjir disalah satu dusun yaitu di dusun Biringkanaya karena perlunya drainase untuk saluran air. Selanjutnya derajat bantuan pemerintah daerah akan dilihat dari status/posisi IDM Daerah Biringala yang terdiri dari 3 indikator dimana kondisi yang terjadi di Desa Biringala, yaitu Indeks Ketahanan Sosial menyangkut pelayanan sosial kesehatan seperti puskesmas yang tidak terdapat di lingkungan Biringala, Indeks Ketahanan Ekonomi atau kegiatan perekonomian untuk memasarkan hasil produksi masyarakat desa tidak bisa terpenuhi karena tidak adanya wadah yaitu pasar dan Indeks Ketahanan Ekologis/Lingkungan untuk sebagian lingkungan masih berpotensi terjadinya banjir apalagi ketika musim hujan.

Penjelasan dari KASI KESRA Desa Biringala.

Terdapat perbedaan makna strategi sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yang termuat dalam buku tersebut (Wibawa, 2012). Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mencirikan strategi sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang terkoordinasi. Carl J. Friedrich mencirikan strategi sebagai kemajuan kegiatan yang diusulkan oleh individu, pertemuan atau pemerintah dalam iklim tertentu dengan menunjukkan hambatan dan pintu terbuka untuk pelaksanaan pengaturan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Publik berasal dari kata public yang artinya berbeda dalam bahasa Indonesia, bergantung pada kata yang pergi. Bercirikan luas, individu, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintah. Irfan Islamy memberikan gambaran tentang ragam implikasi kata publik dalam rangkaian kata pengiring yang terdapat dalam kitab tersebut (Suwitri, 2008).

Opini Publik dijabarkan dengan penilaian umum. Kata publik memiliki makna keseluruhan. Perpustakaan Umum mengartikan Perpustakaan Rakyat. Kata publik memiliki arti individu. Kesehatan Masyarakat diartikan sebagai kesejahteraan umum.

Kata publik juga dapat diartikan sebagai masyarakat. Dari satu kata publik terkandung kepentingan keseluruhan, individu dan masyarakat.

Dalam model pelaksanaan Merilee S. Grindle menggaris bawahi dengan berbagai variabel untuk mencapai kemajuan suatu pelaksanaan dan tingkat pencapaian meliputi variabel penunjuk antara substansi strategi dan iklim strategi substansi dalam pendekatan tersebut sesuai atau tidak dan apakah iklim pengaturan mendukung pencapaian tersebut interaksi dari suatu pengaturan. Eksekusi prestasi seperti yang ditunjukkan oleh Merilee S. Grindle" dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu substansi strategi (content of strategy) dan iklim eksekusi (setting of execution)

Dapat diketahui bahwa model strategi eksekusi yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana keduanya menunjukkan variabel yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi sebagaimana dinyatakan, variabel vital dalam eksekusi suatu eksekusi.

van meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi eksekusi, lebih spesifiknya; "1) strategi standar dan target; 2) aset; 3) antara korespondensi hierarkis dan penguatan latihan; 4) atribut agen spesialis ; dan 5)

kondisi sosial, aspek keuangan dan politik".Penyebab-penyebab tersebut merupakan penanda kritis dalam setiap pendekatan yang ada sebagai acuan pemerintah dalam membuat strategi dan disesuaikan melalui penunjuk sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik.

Dalam teknik-teknik saat ini eksekusi atau eksekusi harus sesuai dengan strategi yang ada, sehingga setiap eksekusi dapat berjalan dengan baik, adanya penanganan isu-isu yang ada secara lokal, dalam strategi tersebut sasaran dan arah pendekatan merupakan hal yang penting, mengingat Fakta bahwa setiap kali suatu kesepakatan dibuat maka akan berdampak positif dan siap untuk mencapai tujuan sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian adanya sumber daya yang memuaskan juga Menjadi penanda tercapainya suatu kesepakatan, selanjutnya korespondensi antar asosiasi juga dapat memberikan hubungan Di antara pihak-pihak yang melakukan strategi pelaksanaan, jika pelaksanaan surat menyurat dilakukan dengan baik, maka penataannya akan berjalan dengan baik (Amanda, 2016).

Model strategi eksekusi yang berpandangan top down yang dibuat oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model strategi eksekusi

publik dengan Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Pelaksanaan. “Dalam metodologi hipotetis ini ada empat penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan yang berhasil dari suatu perjanjian, untuk lebih spesifiknya: “1. Korespondensi; 2. Aset; 3. Sikap; dan 4. Daerahin regulasi. Keempat penyebab tersebut saling berhubungan satu sama lain

Ada dua model yang gagah dalam tahap eksekusi penataan, yaitu model hierarkis dan model basis. Kedua model ini ditemukan dalam setiap proses pembuatan pendekatan. Model kelas dunia, model proses dan model bertahap dianggap sebagai gambaran pembuatan strategi berdasarkan model hierarkis dan basis.

Desa dapat diketahui bahwa substansi yang sah di mana daerah pemerintahan yang berbeda tinggal, atau kota dapat diketahui bahwa lambang atau unit geografis, sosial, moneter, politik dan sosial yang ada di sana (suatu wilayah), sebanding dengan dan dampak bersamanya dengan distrik yang berbeda. A kota masih sulit untuk dibangun, bukannya mereka lebih suka tidak mengembangkan sesuatu yang baru kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diajarkan pendahulu mereka di sini karena daerah yang asri sangat tertutup untuk hal-hal baru sejak

mereka benar-benar berpegang teguh pada adat istiadat yang diinstruksikan oleh para pendahulu mereka.

Menurut Sutardjo Kartodikusuma, kota dapat diketahui bahwa unsur yang sah di mana suatu wilayah administrasi bertempat tinggal

Mandiri. Sesuai CS Kansil. Kota dapat diketahui bahwa suatu wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai penduduk sebagai suatu kesatuan wilayah, termasuk suatu kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai persekutuan pemerintahan paling sedikit secara langsung di bawah kepala daerah dan mempunyai pilihan untuk menjalankan keluarganya sendiri dalam kewajiban Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia.

Menurut Bintaro, kota dapat diketahui bahwa enkapsulasi atau solidaritas geologi, sosial, ekonomi, masalah pemerintahan, dan budaya yang ada di sana (suatu wilayah), dalam hubungan dan dampak yang proporsional dengan wilayah yang berbeda.

Menurut Bintarto. Menurut perspektif topografi, kota dicirikan sebagai kerangka jaringan kehidupan sehari-hari yang digambarkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan digambarkan oleh lapisan moneter yang heterogen dan contoh materialistis atau

dapat juga diartikan sebagai adegan sosial yang dibawa oleh normal dan non-reguler. komponen dengan indikasi fiksasi populasi. yang sangat besar dengan gaya hidup yang heterogen dan materialistis yang kontras dengan wilayah di belakangnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Arnold Tonybee. A kota bukan hanya pemukiman yang luar biasa tetapi juga merupakan kebingungan yang luar biasa dan setiap kota menunjukkan ciri khasnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Max Weber. A kota dapat diketahui bahwa di mana penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan moneter mereka di pasar terdekat.

Peningkatan kota dan kemajuan wilayah lokal negara telah menjadi dua istilah yang sering disalah artikan sebagai implikasinya. Terlepas dari kenyataan bahwa menurut definisi keduanya memiliki implikasi yang agak berbeda. Sumarja mengungkapkan, pembenahan wilayah merupakan upaya kemajuan yang hanya ditujukan pada kualitas manusia, sedangkan pembenahan pedaaerahan mencari kemajuan wilayah lokal yang dalam energi yang kooperatif dengan iklim kehidupannya.

Gagasan Kemandirian Daerah dapat dibentuk sebagai apa yang dapat dibandingkan dengan signifikansi

gagasan yang harus dilihat dari tiga (3) indikator, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan untuk mengkokohkan upaya pencapaian tujuan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan seperti tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, yakni meminimalisir jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan memaksimalkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Sasaran dari pembangunan tersebut memerlukan kejelasan Lokus (Desa) dan status perkembangannya. Indeks Desa Membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap Desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat ditingkatkan sebagai indikator untuk melakukan targetting dalam pencapaian target dan koordinasi dalam pengembangan Desa.

IDM lebih menjadikan fokus pada upaya peningkatan otonomi Desa. Indeks ini beriringan dengan semangat nasional dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan Desa seperti yang tercantum sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan melalui optimalisasi

pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik pembangunan Indonesia dari Desa melalui terbentuknya kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Azas-azas yang merupakan dasar peraturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan kejelasan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa itu dipaparkan meliputi kewenangan yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbentuk untuk pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa menjadi dasar bagi cara pengembangan dan pendekatan tentang Desa, mendaulukan prinsip keberagaman, azas rekognisi dan subsidiarita serta memberikan kekuatan dalam ciri-ciri kewenangan Desa. Pasal 4 Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pengaturan Desa, yaitu merefleksikan halangan dan hambatan struktural dalam pengembangan Desa yang harus kerjakan di satu sisi, serta

apa yang menjadi kehendak perwujudan melalui implementasi Undang Undang Desa di sisi yang lain. Secara teknokrasi pembangunan, pesan penting „membangun Indonesia dari Desa“ termuat dalam NawaCita yang juga telah diadopsi penuh menjadi *Agenda Pembangunan Nasional* dalam RPJMN 2015 – 2019. (Gunungbentang, n.d.).

METODE

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan. Lokus penelitian berada di Desa Biringala karena peneliti melihat bahwa di Desa Biringala belum memiliki pilihan untuk menangani masalah yang dialami dan belum memiliki pilihan untuk menggali potensi yang dimiliki Desa Biringala sehingga implementasi kebijakan IDM yang baik diharapkan dapat membantu menangani permasalahan melalui data pembangunan yang menjadi rujukan Desa Biringala.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diketahui bahwa penelitian yang berencana untuk memahami kemampuan yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian seperti perilaku, inspirasi, wawasan, aktivitas, dan sebagainya secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, dalam pengaturan

reguler yang luar biasa dan dengan menggunakan strategi normal yang berbeda.

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi subjektif: Pertama, Observasi. Persepsi dapat diketahui bahwa prosedur untuk mendapatkan informasi subjektif dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari objek penelitian. Dimana objek dalam penelitian ini dapat diketahui yaitu Desa Biringala dan itu berarti peneliti akan datang langsung dan melihat keadaan sekitarnya, kemudian disusun menjadi informasi observasional. Kedua, Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti. Orang-orang yang dipilih seperti pemerintah desa Biringala sebagai contoh. Ketiga, Studi Dokumen. Studi laporan dapat diketahui bahwa metode yang dilakukan dengan mengaudit beberapa catatan yang berhubungan dengan subjek penelitian. Laporan ini dapat berupa file foto, catatan surat, catatan harian, jurnal, notulen rapat, dll di Kantor Desa Biringala.

Proses penyelidikan atau analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yaitu Pengumpulan Data, Reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk memastikan tingkat keabsahan data dari penelitian ini maka digunakan beberapa teknik Triangulasi seperti berikut: Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indeks Desa Membangun merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur tingkat kemandirian suatu desa dimana pelaksanaannya adalah pemerintah desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan Desa Biringala merupakan salah satu desa yang melaksanakan program IDM ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan IDM menggunakan Teori menurut Van Meter dan Van Horn terdapat 6 aspek sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran

tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. (Pioh et al., 2015)

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa standar dan sasaran kebijakan Indeks Desa Membangun tentunya menyesuaikan dengan regulasi yang ada, di dalam IDM terdapat tiga Indeks komposit dengan beberapa sasaran penilaian yang harus di capai yang pertama, Indeks Ketahanan Ekonomi yang menjadi standar penilaian dan sasaran kebijakan yaitu Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk, Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen), Terdapat pasar desa, Terdapat sektor perdagangan (warung minimarket), Terdapat kantor pos dan jasa logistik, Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR, Akses penduduk ke kredit, Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/ Bumdes, Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan, Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi, Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Kualitas jalan desa.

Kedua untuk Indeks Ketahanan Sosial yang menjadi standar penilaian

yaitu Pelayanan kesehatan, Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, Jaminan kesehatan, Solidaritas sosial, Akses fasilitas informasi dan komunikasi, Akses ke fasilitas listrik, Akses ke fasilitas sanitasi, Akses air bersih dan layak minum, Kesejahteraan Soaial, Toleransi, Rasa aman warga desa, Akses pendidikan dasar menengah, Akses pendidikan Non formal dan Akses pengetahuan masyarakat.

Ketiga untuk Indeks Ketahanan Lingkungan yang menjadi standar atau sasaran yaitu, bagaimana keadaan lingkungan Pencemaran air,tanah dan udara, Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) dan Upaya/ tindakan terhadap potensi bencana alam yang terjadi.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Biringala sebagai pelaksana kebijakan sudah sangat memahami apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan Indeks Desa Membangun selanjutnya dalam pengisian kuisisioner penilaian IDM kepala desa bersama pemerintah desa Biringala lainnya sangat kooperatif dan jujur berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator kedua yaitu Sumber Daya, Van Mater dan Van Horn menegaskan Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”(Dewi, 2020)

Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa sumber daya yang ada di Desa Biringala masih cukup minim untuk meningkatkan pembangunan terutama untuk pembangunan fisik hal ini mulai terjadi ditahun 2019-2-2022 selama masa pandemik. Sumber daya pendapatan Desa Biringala untuk tahun anggaran 2022 rinciannya yaitu PAD = Rp.10.000.000, ADD = Rp.653.819.093, DD = Rp.1.218.630.000 untuk pembagiannya 40% Untuk BLT, 20% Untuk ketahanan

pangan, 8% Untuk Covid 19 dan 32% Untuk kegiatan prioritas sesuai Indeks Ketahanan Ekonomi, sosial dan lingkungan Desa Biringala.

Adapun untuk sumber daya manusia yang ada di Desa Biringala berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki bisa dikatakan berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Biringala dalam pelaksanaan kebijakan Indeks Desa Membangun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan kebijaka IDM Di Desa Biringala itu memiliki sumber daya finansial atau pendapatan dan sumber daya manusia untuk Implementasi Kebijakan IDM. Sumber daya finansial dimanfaatkan untuk pembangunan desa wisata, Drainase di Dusun Bontobila dan jalan lingkak Dusun Ballaparang Desa Biringala.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator ketiga yaitu Karakteristik organisasi pelaksana seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat

mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan serta pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.(Hernawan & Pratidina, 2015)

Struktur birokrasi atau tatanan organisasi pelaksana Kebijakan IDM Di Desa Biringala yaitu berdasarkan struktur pemerintahan yang ada di Desa Biringala dimana Kepala Desa di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa sebagai pelaksana dan KASI Kesejahteraan Desa Biringala sebagai petugas penginputan data sebagai admin.

Norma-norma atau aturan pelaksanaan tentunya sudah ada dan tertuang dalam Standar Operasional Prosedur(SOP) yang dibuat sebagai acuan panduan pelaksanaan bagi stakeholder terlibat dimana didalamnya tertuang SOP pemuktahiran status perkembangan desa secara rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Pola hubungan yang terjadi dalam organisasi pelaksana yaitu Kepala Desa ber tugas untuk mengisi kuisioner IDM secara benar dan sesuai dengan fakta dan data dilapangan akan tetapi tugas ini dipegang oleh KASI Kesejahteraan setelah adanya data atau fakta dari

kepala Desa yang kemudian dalam pengisiannya akan di dampingi oleh Pendamping Lokal Desa kemudian dibuatkan berita acara yang akan ditanda tangani oleh kepala Desa Biringala. Berita acara dimaksud akan diserahkan ketingkat kecamatan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam analisis karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan IDM di Desa Biringala sudah sesuai dengan karakteristik dan tujuan dari IDM yaitu untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator keempat yaitu Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan

harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.(Sahupala, 2020).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Biringala terkait standar ataupun sasaran tujuan kebijakan IDM dikomunikasikan atau disampaikan kepada organisasi yang terlibat dengan cara bermusyawarah untuk setiap kegiatan yang di laksanakan terutama yang menyangkut dengan penilaian IDM akan di musyawahkan terlebih dahulu dengan adanya komunikasi yang konsistem dan seragam maka tercipta hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi-organisasi yang terlibat, Sebelum melaksanakan proses penginputan IDM maka pemerintah Desa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di desa termasuk organisasi-organisasi yang ada di desa demi tercapainya tujuan dari implementasi IDM Di Desa Biringala.

Beberapa organisasi yang terlibat untuk upaya peningkatan ketahanan indikator komposit dalam IDM seperti BUMDes Desa Biringala yang telah membangun usaha agar bisa mendapat PAD atau Pendapatan Asli Desa untuk menunjang perekonomian di Desa Biringala, BPD Desa Biringala sebagai organsasi penampung aspirasi masyarakat, PKK sebagai penggerak

kegiatan keperempuanan dan Karang taruna sebagai organisasi peningkatan kualitas kepemudaan yang ada di Desa Biringala.

Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator kelima yaitu Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.(Barat & Minahasa, 2021).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan Indeks Desa Membangun di Desa Biringala tidak terdapat penolakan justru sebaliknya sikap dari pemerintah Desa Biringala mendukung pelaksanaan kebijakan IDM Di Desa Biringala dan terlihat dari pencapaian yang sejauh ini sudah di dapat dimana Desa Biringala berada di status Desa Maju dengan nilai IDM 0,7702.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dari informan dan observasi dilapangan untuk indikator keenam Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan.(Aniq & Suryaningsih, 2019)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan eksternal Desa Biringala sangat mendukung untuk meningkatkan pembangunan di desa baik itu dari lingkungan sosialnya yang tinggi solidaritas dan toleransi masyarakat, lingkungan ekonomi yang sebagian besar masyarakat berpenghasilan dari perdagangan begitupun dengan lingkungan politik yang kondusif. lingkungan eksternal Desa Biringala mendukung untuk implementasi kebijakan IDM yang baik di Desa Biringala.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang di ukur melalui teori dari Van Metrer dan Van Horn dapat dikatakan implementasinya berhasil, dengan 6 indikator sebagai acuan yaitu Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

REFERENSI

- Aniq, N. F., & Suryaningsih, M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. *Journal of Public Policy And Management Review*, 8(3).
- Barat, K. K., & Minahasa, K. (2021). Implementasi Program Mapalus Covid-19 di Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Dewi, I. A. R. K. (2020). Inovasi Pelayanan Publik “Sapaku Malam” di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), pp. 104–120.
- Gunungbentang, D. (n.d.). *Indeks desa membangun*.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2),

pp. 94–103.

Pioh, E., Posumah, J., & Tulusan, F. (2015). Implementasi Kebijakan Pengasuhan Anak Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Panti Asuhan Nazareth Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(029), p. 1300.

Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), p. 152. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i4.1079>